

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan termasuk aset daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan;
 - e. Pelaksanaan fungsi BUD;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB										
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	1. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai SAP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ <p>DO : Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD</p>	Laporan Keuangan PD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi										
		2. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	$\frac{\text{Jumlah aset tetap terdokumentasi legal}}{\text{Jumlah aset tetap}} \times 100\%$ <p>DO : Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN) 2. Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri) 3. Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima 	1. Laporan Barang Milik Daerah 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Aset										
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Sesuai dengan hasil LHE SAKIP dengan komponen penilaian sbb: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi AKuntabilitas Kinerja</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Komponen	Bobot	Perencanaan Kinerja	30	Pengukuran Kinerja	30	Pelaporan Kinerja	15	Evaluasi AKuntabilitas Kinerja	25	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset
Komponen	Bobot														
Perencanaan Kinerja	30														
Pengukuran Kinerja	30														
Pelaporan Kinerja	15														
Evaluasi AKuntabilitas Kinerja	25														

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																														
			merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan SAKIP adalah terlaksananya penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.																																
		2. Nilai RB	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur	Hasil PMPRB	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset																														
		3. Nilai IPP	<p>Sesuai dengan LHE IPP dengan kriteria penilaian:</p> <table border="1" data-bbox="1031 686 1639 1344"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01-1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51-2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01-2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51-3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01-3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51-4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01-4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51-5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indeks penilaian publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di</p>	Range Nilai	Kategori	Makna	0-1,00	F	Gagal	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	1,51-2,00	D	Buruk	2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51-3,00	C	Cukup	3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51-4,00	B	Baik	4,01-4,50	A-	Sangat Baik	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	Hasil penilaian IPP	Sekretariat
Range Nilai	Kategori	Makna																																	
0-1,00	F	Gagal																																	
1,01-1,50	E	Sangat Buruk																																	
1,51-2,00	D	Buruk																																	
2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																																	
2,51-3,00	C	Cukup																																	
3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)																																	
3,51-4,00	B	Baik																																	
4,01-4,50	A-	Sangat Baik																																	
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima																																	

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB										
		4. Nilai SKM	<p>Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian SKM dengan kriteria penilaian:</p> <table border="1" data-bbox="1041 380 1430 727"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00-2,5996</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60-3,064</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>2,0644-3,532</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324-4,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p>	Nilai Interval	Kategori	1,00-2,5996	Tidak Baik	2,60-3,064	Kurang Baik	2,0644-3,532	Baik	3,5324-4,00	Sangat Baik	Hasil penilaian SKM	Sekretariat
Nilai Interval	Kategori														
1,00-2,5996	Tidak Baik														
2,60-3,064	Kurang Baik														
2,0644-3,532	Baik														
3,5324-4,00	Sangat Baik														

Sidoarjo, 2 Januari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001